

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN BANTIMURUNG
DIDESA BANTIMURUNG KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh:

ZULKIFLY MAHDI

Nomor Stambuk : 105640174113



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN BANTIMURUNG
DIDESA BANTIMURUNG KECAMATAN BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ZULKIFLY MAHDI

Nomor Stambuk : 105640174113

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan objek wisata air terjun Bantimurung di desa Bantimurung kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara.

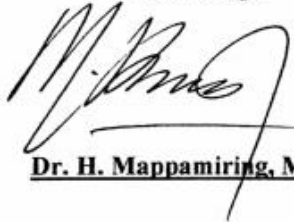
Nama Mahasiswa : Zulkify Mahdi

Nomor Stambuk : 10564 01741 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Muhammad Ahsan Samad, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/1/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2018

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. **Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)**



2. **Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH**

3. **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**



4. **Muhammad Ahsan Samad, S.IP, M.Si**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulkifly Mahdi
Nomor Stambuk : 105640174113
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melaksanakan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 4 Februari 2018

Yang Menyatakan,



Zulkifly Mahdi

ABSTRAK

ZULKIFLY MAHDI, 2018. Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Bantimurung DiDesa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. (dibimbing oleh H. Mappamiring dan Muhammad Ahsan Samad).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan kendala-kendala yang mempengaruhi pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung di desa Bantimurung kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara adalah pengelolaan sebagai perencanaan, pembangunan, dan pengembangan. Adapun beberapa implementasi pengelolaan yang dilakukan yakni, Perencanaan yang dilakukan terfokus pada satu titik agar kiranya pengelolaan yang dilakukan akan terlihat hasilnya. Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap obyek yang akan dikelola agar dapat menyusun segala perencanaan dengan sebaik baiknya.

Kata kunci: Perencanaan, pembangunan, pengembangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Objek Wisata Bantimurung Di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”**. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Ahsan Samad, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto S.Ip, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Universitas Muhammadiyah Makakssar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan sanantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Pihak Dinas Kebudayaan Dan Parwisata yang telah memberikan informasi mengenai pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung.
7. Pihak desa Bantimurung yang telah meluangkan waktunya dalam membantu memberikan data-data yang di perlukan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 4 Februari 2018

Zulkifly Mahdi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengelolaan	9
B. Konsep Pengelolaan	12
1. Perencanaan	13
2. Pembangunan	15
3. Pengembangan.....	17
C. Konsep Pariwisata	18
D. Kendala-Kendala Pengelolaan	20
E. Kerangka Pikir	21
F. Fokus Penelitian	22
G. Deskripsi Fokus Penelitian	22

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Pengabsahan Data	28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	30
1. Deskripsi Kabupaten Luwu Utara	30
2. Deskripsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.....	32
B. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	33
1. Sumber daya SKPD	33
2. Anggaran	34
3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	35
4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	35
C. Kawasan Objek Wisata Air Terjun Bantimurung	36
1. Letak Kawasan Objek Wisata Bantimurung	36
2. Sarana Dan Prasarana Umum.....	38
D. Hasil Dan Pembahasan.....	41
1. Perencanaan	65
2. Pembangunan	48
3. Pengembangan.....	50
E. Kendala-kendala yang dihadapi dinas kebudayaan dan pariwisata....	50
1. Sarana dan prasarana	51
2. Kesadaran masyarakat	57
3. Keamanan Pengunjung	60

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian.....	24
Tabel 2 Administratif Kabupaten Luwu Utara.....	29
Tabel 3. Administratif kecamatan Bone-Bone.....	37

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Kerangka pikir	21
Bagan 2. Srtuktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	33
Denah Desa Bantimurung	38
Dokumentasi Lokasi Air Terjun	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidak berhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu.

Dasar hukum pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengelolaan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui

pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8:

- 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. (Pasal 11) Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.

Pariwisata saat ini merupakan bisnis unggulan, sebagian orang memutuhkan hiburan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak di ragukan lagi. Pariwisata yang merupakan suatu industri dalam perkembangannya juga mempengaruhi sektor-sektor industri di sekelilingnya.

Pariwisata sesungguhnya telah dimulai sejak peradaban manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Bagi Indonesia, jejak pariwisata dapat di telusuri kembali ke dasawarsa 1910-an, yang ditandai dengan dibentuknya VTV (*Vereenging toristen Vekker*), sebuah badan pariwisata

Belanda, di Batavia. Badan pemerintah ini sekaligus juga bertindak sebagai *tour operation* dan *travel agent*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia. Hal ini mendapatkan respon yang sangat baik, dengan meningkatnya minat masyarakat Belanda dan Eropa untuk berkunjung ke Indonesia. sebagai salah satu fenomena yang di timbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia maka perkembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata atau *tourist destination* ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini.

1. Daya tarik wisata (*tourist attraction*)
2. Kemudahan perjalanan atau aksesibilitas ke daerah tujuan wisata yang bersangkutan, dan
3. Sarana dan fasilitas yang di perlukan mengingat kegiatan wisata tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif.

Daerah tujuan wisata merupakan salah satu komponen penting sumber daya pariwisata. Faktor geografi merupakan faktor penting untuk pertimbangan pengembangan kepariwisataan. Pendekatan geografi yang mendasarkan pada aspek keruangan mempunyai kaitan yang erat dengan persebaran dari suatu objek pembahasan. Pengembangan pariwisata yang banyak menggunakan pendekatan keruangan dapat dilihat dari kedudukan objek wisata terhadap objek wisata dan adanya kemungkinan untuk dikembangkan atau berkembang.

Pengelolaan kepariwisataan tidak akan lepas dari unsur fisik dan non fisik. Unsur-unsur fisik dan non fisik tersebut akan menjadi pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan daya dukung dan objek dan pertimbangan dampak-dampak yang di timbulkan dari pengelolaan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus

di dasarkan pada perencanaan, pembangunan, dan arah pengembangan. Pengembangan pariwisata secara sistematis dan arah pengelolaan itu sendiri sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Sebagaimana tercermin dalam pembentukan dan pengakuan terhadap organisasi pariwisata nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata, diantaranya merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata dan berperan sebagai alat pengawasan kegiatan pariwisata sehingga dapat memaksimalkan daerah pengelolaan tujuan pariwisata. Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir, dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi di sektor pariwisata. Kabupaten Luwu Utara memiliki berbagai objek pariwisata unggulan yang bisa sangat membantu masyarakat untuk melepaskan penat. Objek wisata tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata.. Pengelolaan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan

memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya. Lokasi objek wisata ini berada di bagian utara kecamatan Bone-Bone, kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan atau tepatnya di desa Bantimurung.

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat $2^{\circ}30'45''-2^{\circ}37'30''$ LS dan $119^{\circ}41'15''-121^{\circ}43'11''$ BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan provinsi Sulawesi Barat di sebelah barat. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas $14.447,56 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah $7.502,58 \text{ km}^2$. Secara administrasi terdiri 11 kecamatan 167 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003) atau sekitar 50.022 Kepala Keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 hanya 33,31% atau sebanyak Rp. 4,06 triliun.

Objek wisata Bantimurung cukup mudah dijangkau karena tidak begitu jauh dan dapat diakses dengan menggunakan roda dua maupun roda empat. Hanya butuh waktu kurang lebih satu jam perjalanan untuk sampai ke lokasi jika

menggunakan kendaraan pribadi dari kota Masamba, ibu kota Luwu Utara. Jika dari Masamba, anda terlebih dahulu menuju ke utara atau Bone-Bone dengan jarak sekitar 30 kilometer. Lalu melanjutkan perjalanan sekitar 10 kilometer ke desa Bantimurung dengan akses jalan yang sebagian besar baru tahap pengerasan.

Adapun peraturan daerah paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Rampi, Kecamatan Limbong, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Seko.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdapat di Kecamatan Rampi, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Masamba, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Baebunta.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdapat di Kecamatan Masamba, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Rampi, Kecamatan Seko, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Limbong.

Dari uraian diatas perlu disadari oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata yang sangat berperan penting dalam pengelolaan suatu

objek wisata mengingat bahwa objek wisata Bantimurung adalah salah satu tempat wisata yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan pendapatan daerah. Solusi-solusi yang dimaksud dalam hal ini adalah strategi terkait dengan pengembangan objek wisata air terjun Bantimurung agar dapat lebih berdaya saing dalam menarik wisatawan. Strategi sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan melestarikan kawasan wisata dengan menggunakan dimensi-dimensi strategi yang menciptakan strategi yang sesuai dengan pengelolaan kawasan obyek wisata Bantimurung ini.

Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata dapat mengambil langkah yang strategis dari pilihan yang ada. Strategi menjadi sangat penting bagi pengelolaan sebuah wisata dalam rangka pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa dalam strategi pengelolaan berdasarkan dimensi-dimensi strategi yang digunakan yaitu tujuan, kebijakan dan program .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dalam studi ini diarahkan untuk mencapai tujuan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung di desa Bantimurung kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara.?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung di desa Bantimurung kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi bagaimana tata kelola pemerintah kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung yang dilakukan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Luwu Utara.
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara dalam pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Luwu Utara dalam upaya pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata Bantimurung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *menegiare* yaitu yang artinya menangani alat-alat, berasal dari bahasa latin *manus* yang artinya tangan. Dalam bahasa Prancis terdapat kata *mesnagement* yang kemudian menjadi *management*.

Menurut Siswanto, (2005: 21) pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan .

Sedangkan menurut Munir, (2006: 9) Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya.

Menurut Sobri, (2009: 34) pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Kamus besar bahasa Indonesia, (2005: 534). Pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No.61 Tahun 2007, pola tata kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi yang menerapkan PPK –BLUD.

perspektif *state of the art of management*, maka pembangunan kepariwisataan ditentukan oleh faktor skala, kapasitas, kompleksitas dan sinergi. Setiap destinasi pariwisata yang memiliki identitas, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Tata kelola destinasi pariwisata dengan konsep *destination management organization* dan *destinastion governance*, menyeimbangkan penerapan nilai

etika, estetika dan ekonomi serta lokalitas untuk menciptakan kualitas pengalaman berwisata, optimalisasi manfaat yang inklusif bagi masyarakat serta lingkungan.

Model pengelolaan destinasi ke depan memerlukan eksplorasi tatanan nilai, lokalitas, keseimbangan, *championship*, *leadership* dan akuntabilitas agar menciptakan keunggulan destinasi yang berkualitas (*destination excellence*) sekaligus menjadi pilihan dan preferensi wisatawan sebagai destinasi pariwisata masa depan (*destination of the future*). penggalan nilai lokal diadopsi dalam pembangunan kepariwisataan perlu memperoleh perhatian yang seksama untuk meningkatkan kualitas keunikan, kekahasaan, lokalitas dan keutuhan yang menjadi ciri pengembangan destinasi pariwisata agar memiliki *point of difference* dalam kepariwisataan. mencermati *stock of knowledge* yang dimiliki bangsa ini sebagai aset dan potensi untuk dikembangkan dengan pendekatan nilai tambah dalam konteks *economy of experience* berbasis nilai etika, estetika, dan ekonomi. I Gede Ardika.

memahami sosok pariwisata secara utuh kita harus memandangnya dari berbagai sisi. Sudut pandang nilai adalah salah satu di antaranya. Pariwisata sarat dengan nilai bawaan dan bersua dengan nilai yang tidak selalu sama di destinasi. Lalu destinasi berfungsi sebagai arena kontestasi beragam nilai. Disini terjadi pertarungan dan interaksi antara nilai etika, estetika, dan ekonomi lokal dengan nilai global yang direpresentasi oleh pariwisata. Interaksi nilai tersebut berlangsung rumit dan sering tidak disadari oleh publik. Bagaimana alur yang terjadi sesungguhnya ? “seringkali relasi tidak simetris, sebaliknya menciptakan pola superioritas dan subordinasi, termasuk praktik distribusi ekonomi”.

Caranya, seperti disarankan penulis, adalah nilai lokal yang positif sangat perlu diakomodasi di dalam aplikasi tata kelola pariwisata. Arena pertukaran yang berimbang perlu disiapkan agar hanya nilai-nilai positif internal dan eksternal yang muncul dalam tata kelola pariwisata.

B. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. *Managemen* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus.

Menurut Richard, (2002: 56) manajemen merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Menurut Handoko, (2000: 10) mengemukakan bahwa bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Menurut Atmodiwiryo, (2005: 5) pengelolaan diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dari beberapa

pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Paturusi, (2008: 8), menyatakan bahwa perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan berpikir yang lingkungannya menyeluruh dan mencakup bidang yang sangat luas, dan berbagai komponennya saling kait mengkait.

“Perencanaan adalah penerapan pengetahuan tepat guna secara sistematis, untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan pperwujudan masa depan yang diinginkan sebagai tujuan yang akan dicapai.” Nawawi, (2003: 31).

Dalam proyeksi ke masa depan, perencanaan mengandung pengertian upaya peningkatan atau penurunan suatu kondisi yang ada pada saat ini. Peningkatan/penurunan ini harus dilandasi oleh pertimbangan perencanaan tingkat operasional, yang meliputi program-program aksi jangka pendek, termasuk *business plan* dan pengendaliannya, yang harus dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola destinasi (*Destination Management Organization*).

Menurut Richardson, (2004: 241) menyatakan bahwa untuk tercapainya sebuah perencanaan yang sistematis diperlukan sebuah proses perencanaan strategis (*the strategic planning process*). Perencanaan strategis merupakan “*the*

managerial process of matching an organisation's resources and abilities with its business opportunities over the long term. It consists of defining the organisation's mission and determining an overall goal, acquiring relevant knowledge and analysing it, then setting objectives and the strategies to achieve them".

Menurut Rustiadi, (2006: 339) Perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Umumnya perencanaan strategis dalam pariwisata terdiri dari beberapa tahapan, yaitu menentukan bisnis/usaha apa yang akan dimasuki, yang biasanya dicirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha yang dimasuki, menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama organisasi, mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari organisasi, menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan, menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil, mengimplementasikan rencana, mengontrol serta memonitor hasil dan membuat perbaikan jika diperlukan.

mengoptimalkan keuntungan dari pengembangan pariwisata, diperlukan suatu perencanaan yang baik dan matang. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika

direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. Pembangunan

Pembangunan infrastruktur dan fisik penting bagi pengembangan wilayah pariwisata. Semua bangunan fisik harus secara hati-hati didesain dan dioperasikan. Selain itu, infrastruktur juga perlu mencerminkan nilai-nilai konservasi sesuai dengan kebijakan tingkat ekosistem. Infrastruktur tidak terbatas mendukung nilai-nilai konservasi, *best practice* dan *lanskap*, tetapi juga membantu tampilan arsitektur, pemahaman budaya, kehidupan masyarakat, atau pengalaman lokal. Nugroho, (2011: 138)

Sementara itu pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang didasarkan pada keinginan suatu masyarakat bangsa tentunya kearah yang lebih baik. Sasmojo, (2004: 1).

Serta pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Siagian, (2005: 9).

Menurut Antariksa, (2016: 35-36) ada berbagai alasan pemerintah untuk membangun kepariwisataan di dalam suatu negara :

1. Berbagai motifasi tersebut dapat menjadi peluang bagi negara untuk membangun perekonomiannya untuk menjadi suatu pola kebijakan yang terintegrasi.

2. Peluang tersebut mendorong pengertian terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan disekitar destinasi pariwisata, meningkatkan nilai cita suatu wilayah geografis yang telah kehilangan daya tariknya,.
3. Bagi negara berkembang, industri pariwisata dapat dikatakan merupakan media pembangunan ekonomi yang tidak memerlukan investasi yang terlalu besar dalam jangka panjang sebelum dapat memberikan keuntungan.
4. Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana pendukung . jika hal tersebut bergantung pada teknologi negara lain, maka devisa untuk pembangunan akan tersedot keluar negeri karena keharusan untuk mengimpor barang modal dan barang habis pakai (*leakage* atau kebocoran devisa).
5. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi pada perekonomian dunia.
6. Berkaitan langsung dengan upaya penuntasan kemiskinan sektor pariwisata di anggap memiliki peran yang sangat penting.

Kepariwisataan merupakan aktifitas yang luar biasa kompleks, termasuk dalam hal kebijakan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilannya. Kegiatan kepariwisataan pada prinsipnya bukanlah suatu aktifitas pembangunan dasar yang bersifat fisik, melainkan suatu kegiatan gabungan yang membutuhkan kordinasi tingkat tinggi antar pembuat kebijakan. Oleh karena itu sangat diharapkan kemampuan untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal yang dapat mendukung pelaksanaannya. Antariksa, (2016: 48).

Adapun intruksi Presiden No 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagai mana diketahui yang telah ditetapkan pedoman umum aktifitas yang harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh dua puluh satu kementrian dan lembaga pemerintah nondepartemen, termasuk semua kepala daerah tingkat, untuk mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.

3. Pengembangan

Menurut Sugiono, (2011: 407) pengembangan berarti suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu hasil produk tertentu, serta menguji keefektifan dari produk tersebut.

Sedangkan menurut Sunarto, (2013: 64) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual.

Dewasa ini istilah pengembanaan sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis pengembanaan yang diterapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam suatu “peperangan” tertentu. Sementara itu pihak manajemen pengelolaan pengembangan pariwisata terus berusaha agar bagaimana destinasi pariwisata dapat di kembangkan sehingga nantinya dapat di harapkan bisa menunjang stabilitas dari daerah itu sendiri. Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi

berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa negara maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran.

Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi. Dengan mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkat budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan wisata. Nugroho, (2011: 144).

C. Konsep Pariwisata

Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti seluruh, semua dan penuh, wisata berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah, di suatu di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula. Istilah “pariwisata” konon untuk pertama kalinya digunakan oleh Presiden Soekarno

dalam suatu percakapan padanan dari istilah asing *tourism*. pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan.

Sebagaimana di ketahui, di dalam pasal 1 angka 1,3 dan 4 undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (UU Pariwisata), dijelaskan defenisi istilah di maksud sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Sementara itu A. J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa "*Tourism, past, present and future*", berbunyi "pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Sementara Marpaung, (2002: 13) mendefinisikan Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Yoeti, (2008: 242) pariwisata merupakan “mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi di waktu yang akan datang”.

G. Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan

Menurut Mardiasmo (2016:18), kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan adalah sebagai berikut;

a. Pola Pikir Masyarakat

Dengan keterbatasan masyarakat dalam hal tingkat kesadaran terhadap alam dan sekitarnya merupakan satu hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan objek wisata jumlah masyarakat yang sadar akan lingkungan juga tidak banyak, menyebabkan pemerintah kesulitan mengatasi hal ini. Sehingga pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam

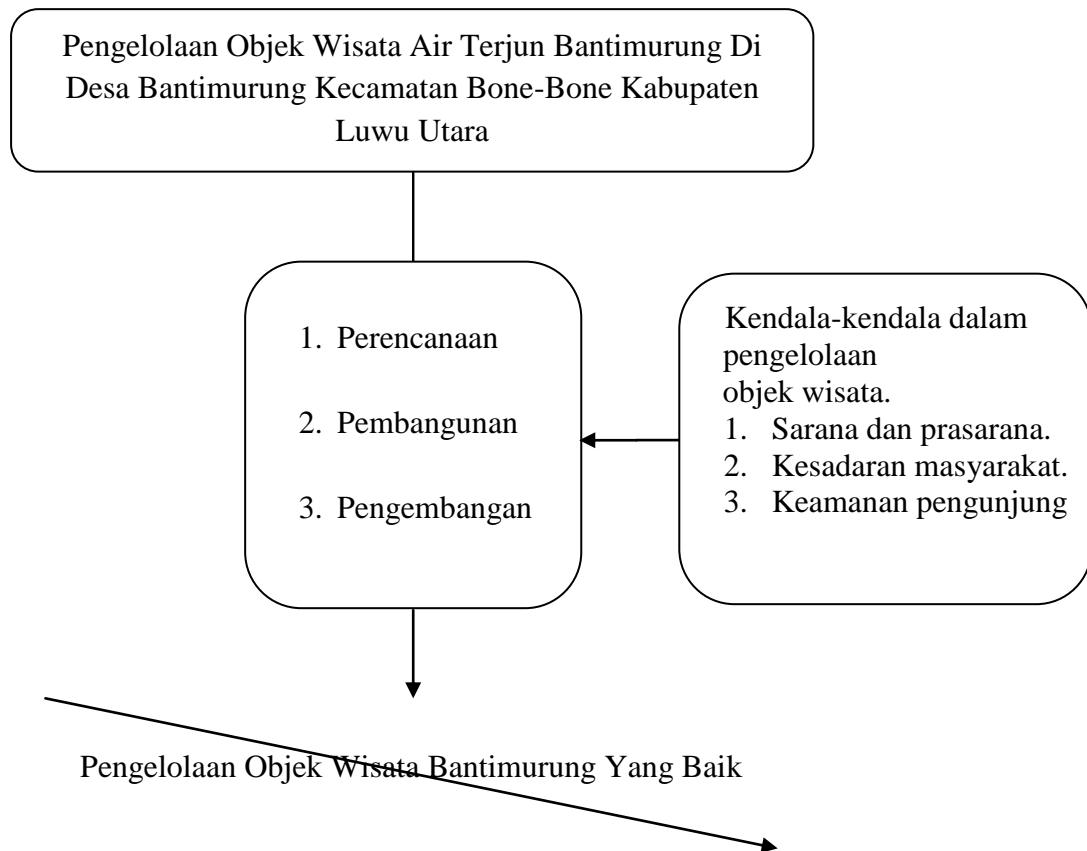
pengelolaan. Pada hal pengelolaan kawasan objek wisata, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan dari pada suatu kawasan objek wisata. Sarana dan prasarana penunjang seperti akses menuju kawasan objek wisata, anggaran, dan hal yang lainnya merupakan suatu kesatuan yang harus ada didalam pengelolaan kawasan objek wisata.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Strategi pengembangan disusun atas dasar analisa lingkungan serta visi, misi, dan tujuan organisasi/perusahaan dalam hal ini Dinas Pariwisata dan kebudayaan .

Objek yang akan dianalisa pada penelitian ini adalah objek wisata Bantimurung dengan menggunakan beberapa dimensi strategi yang dikemukakan. Untuk lebih memperjelas kerangka pikir ini, akan penulis sajikan dalam bentuk gambar di bawah ini.

Bagan 1. Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada tata kelola wisata Bantimurung sehingga terciptanya pengelolaan objek wisata yang baik akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, memajukan industri pariwisata yang ada di kabupaten Luwu Utara. menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya melalui pengelolaan objekwisata Bantimurung.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin di teliti adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

“Perencanaan adalah penerapan pengetahuan tepat guna secara sistematis, untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perwujudan masa depan yang diinginkan sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan objek wisata Bantimurung didesa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

2) Pembangunan

pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu daerah dalam rangka pembinaan dalam pengelolaan objek wisata Bantimurung didesa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

3) Pengembangan

Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pengelolaan objek wisata Bantimurung didesa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Oktober sampai November 2017. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kabupaten Luwu Utara di kawasan wisata desa Bantimurung kecamatan Bone-Bone dengan alasan untuk mengidentifikasi bagaimana pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata air terjun Bantimurung Alasan lain dipilih sebagai tempat Penelitian karena kurangnya Pengelolaan kawasan wisata air terjun Bantimurung di kabupaten Luwu Utara terkhusus didesa Bantimurung kecamatan Bone-Bone.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan objek kawasan wisata Bantimurung di desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara.

b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dalam fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan objek

kawasan wisata Bantimurung didesa Bantimurung kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terutama dijang dari sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang Pengelolaan Objek Wisata Bantimurung Didesa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui dokuman-dokumen mengenai bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Bantimurung Didesa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yaitu:

No	Nama Lengkap	Inisial	Jabatan/ Status	Keterangan
1.	Drs. F.P. Patuang, MM	FPP	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara	1 orang
2.	Maslang	M	Kepala Desa Bantimurung Kabupaten Luwu Utara	1 orang
3.	Salim	S	Pengunjung wisata air terjun Bantimurung	1 orang
4.	Pendi	P	Pengunjung wisata air terjun Bantimurung	1 orang

5.	Untung	U	Pengunjung wisata air terjun Bantimurung	1 orang
6.	Hasmiati	H	Masyarakat desa Bantimurung	1 Orang
7	Bahar	B	Masyarakat desa Bantimurung	1Orang
8	Tamsil	T	Masyarakat desa Bantimurung	1 Orang
9	Mishadi K.P S.TP		Kepala UPTD Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1 Orang
	Jumlah Informan			9 Orang

Alasan peneliti dalam memilih informan diatas dengan bertujuan agar data-data yang diperoleh mengenai pengelolaan wisata Bantimurung tepat dan akurat tentang kebenarannya berdasarkan informan yang dipilih langsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a) Observasi

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Lebih rincinya observasi ini terkait dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas pariwisata dalam pengelolaan wisata Bantimurung

b) Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Dengan objek wawancara dengan beberapa sumber seperti kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala desa Bantimurung, masyarakat desa Bantimurung, serta pengunjung desa Bantimurung. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan wisata Bantimurung dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah tahap selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami. sehingga penarikan kesimpulan diambil dari informan.

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William (dalam Sugiyono, 2009:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratanya dengan menggunakan teknik tertentu.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada sore hari saat narasumber sudah merasa jenuh dan dipenuhi oleh banyak masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan yang berjarak kurang lebih 420 km dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara $01^{\circ} 53' 019''$ - $02^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan (LS) dan $119^{\circ} 47' 46''$ - $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah utara : berbataasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah selatan : berbatasan dengan kabupaten Luwu dan Teluk Bone
- Sebelah barat : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah timur : berbatasan dengan Luwu Timur

Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba, kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba merupakan pecahan dari kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas $14.447,56 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah $7.843,57 \text{ km}^2$. Secara administrasi terdiri 12 kecamatan 169 desa dan 4 kelurahan. Penduduknya berjumlah 250.111 jiwa (2003) atau sekitar 50.022 Kepala Keluarga yang sebagian besar (80,93%) bermata pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB kabupaten Luwu Utara pada tahun 2003 hanya 33,31% atau sebanyak Rp. 4,06 triliun. Dan terdapat 8 sungai besaryang

mengairi wilayah Luwu Utara . dan sungai terpanjang adala sungai Rongkong dengan panjang 108 Km Serta curah hujan beragam selama tahun 2010.

Diantara 12 kcamatan, kecamatan Seko merupakan kecamatan terluas dengan luas 2.109,19 Km² atau 28,11% dari total wilayah kabupaten Luwu Utara. Sekaligus meruakan kecamatan yang paling terjauh dari ibu kota kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 198 Km. pada tahun 2012 di bentuk 1 kecamatan baru yang merupakan perpecahan dari kecamatan Bone-Bone berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 01 tahun 2012 tanggal 5 april 2012 dan peraturan bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2012 4 juni 2012 tentang pembentukan kecamatan Tana Lili dengan jumlah 10 desa.

Tabel 2. Administratif Kabupaten Luwu Utara.

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Luas(Km ²)
1	Seko	Eno	12	2.109,19
2	Rampi	Onondoa	6	1.565,65
3	Masamba	Masamba	19	1.068,85
4	Limbong	Limbong	7	686,50
5	Sabbang	Marobo	20	525,08
6	Malangke	Pattimang	14	350,00
7	Baebunta	Salassa	21	295,25
8	Mappedeceng	Kapidi	15	275,50
9	Sukamaju	Sukamaju	25	255,48
10	Tana Lili	Minna	10	155,1
11	Bone-bone	Bone-bone	11	122,23
12	Malangke Barat	Tolada	13	93,75

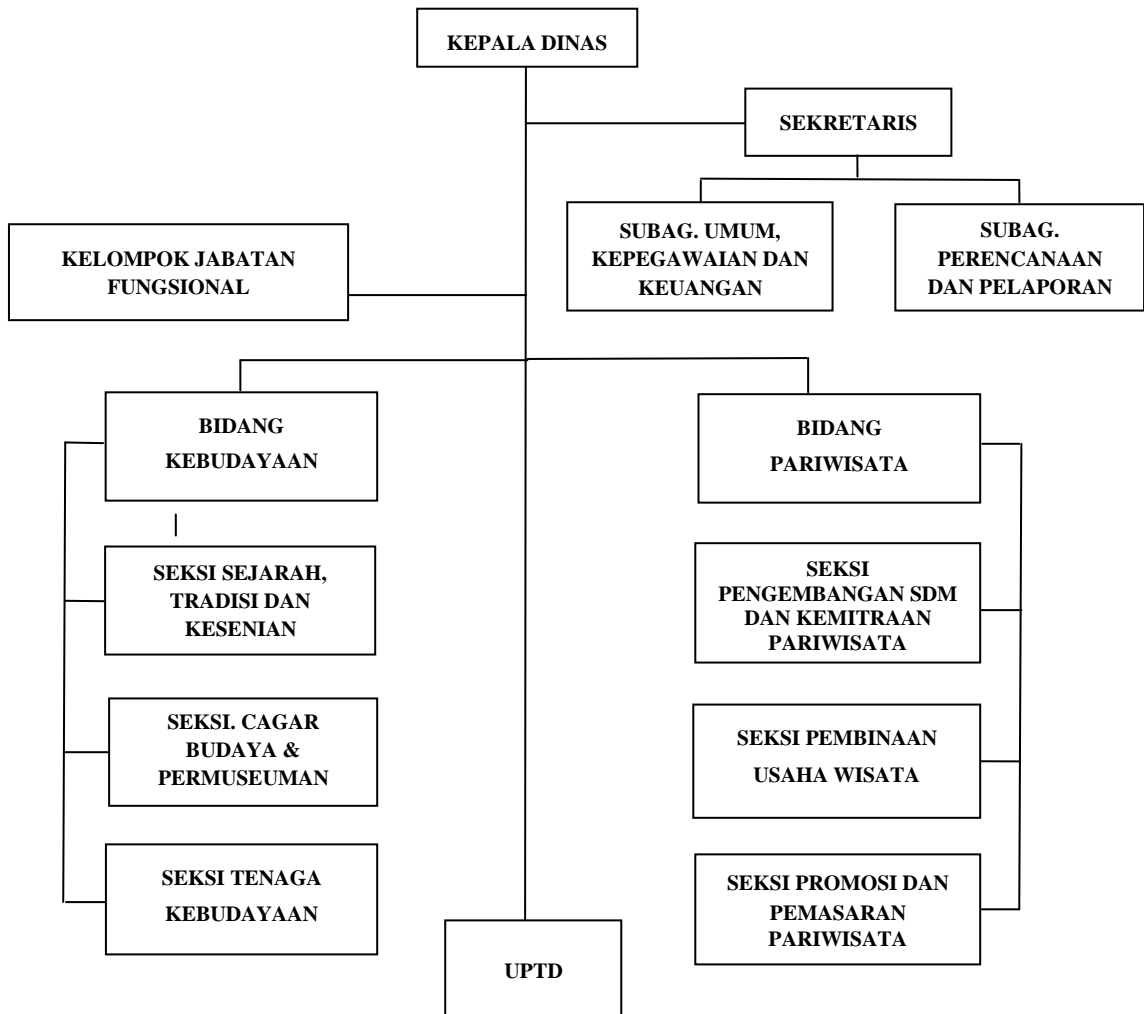
Sumber: luwuutarakab.bps.go.id

2. Deskripsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengan-dalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagan 2. Srtuktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :



B. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1. Sumber Daya SKPD

Kemajuan suatu Organisasi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sangat ditentukan oleh kemajuan SDM yang dimilikinya. Kualitas SDM sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang

berpengaruh secara langsung terhadap lingkungan strategis. Berikut Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Disbudpar:

Daftar pegawai negeri sipil Disbudpar berdasarkan golongan ruang:

1. Golongan IV/c sebanyak : 1 Orang
2. Golongan IV/a sebanyak : 3 Orang
3. Golongan III/d sebanyak : 5 Orang
4. Golongan III/c sebanyak : 2 Orang
5. Golongan III/b sebanyak : 3 Orang
6. Golongan III/a sebanyak : 4 Orang
7. Golongan II/d sebanyak : 1 Orang
8. Golongan II/c sebanyak : 4 Orang
9. Golongan II/b sebanyak : 1 Orang

2. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kab. Luwu Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi anggaran APBD Tahun 2017 Rp. 2.675.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Awal Penggunaan anggaran melalui APBD Tahun 2017 disesuaikan dengan masa pembentukan Organisasi kelembagaan pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara yang ditetapkan pembentukannya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disbudpar harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub secara terpadu (integritied), terukur (mesurable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural yang berlaku di dalam lingkungan Disbudpar. Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan diatas melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Disbudpar adalah sebagai berikut :

A. Bidang Kebudayaan

- Menggali situs-situs di masing-masing daerah di Luwu Utara
- Membentuk Sanggar-Sanggar Seni
- Menggali musik tradisional khususnya rekaman lagu-lagu daerah

B. Bidang Pariwisata

- Memperbaiki sarana di tempat-tempat wisata
- Menyediakan tempat sampah di daerah wisata

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

a. Tantangan

1. Tuntutan Masyarakat akan pentingnya pembenahan Kebudayaan dan Pariwisata yang semakin kuat keseluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara.
2. Tuntutan masyarakat akan pentingnya pengembangan dan pembinaan potensi Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Luwu Utara.

3. Tuntutan masyarakat terhadap proses pengembangan kewisataan di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
4. Tuntutan masyarakat mengenai penguatan nilai-nilai lokal budaya dan adat-istiadat masyarakat Luwu Utara.
5. Terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan;
6. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembangunan pariwisata;
7. Belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kepariwisataan dan kebudayaan ;

b. Peluang

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

C. Kawasan Objek Wisata Air Terjun Bantimurung

1. Letak Kawasan Objek Wisata Air Terjun Bantimurung

Air Terjun Bantimurung yang terletak di Desa Bantimurung yang merupakan salah satu Desa yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Kecamatan Bone-Bone yang terdiri atas 12 Desa/Kelurahan yakni :

Tabel 3. Administratif kecamatan Bone-Bone

NO	Kelurahan/ Desa	Luas(km ²)
1	Bantimurung	24,00
2	Patoloan	23,71
3	Tamuku	21,24
4	Batangtongka	12,30
5	Pongko	11,20
6	Sadar	10,75
7	Sidomukti	10,50
8	Banyuurip	7,52
9	Bone-Bone	6,31
10	Muktisari	5,79
11	Sukaraya	4,95
12	UPT Bantimurung	2,79

Sumber: Bone-Bone dalam angka

Air terjun bantimurung yang terletak di desa bantimurung mempunyai batasan-batasan sebagai berikut.

- a. sebelah utara : berbatasan dengan provinsi Sulawesi Barat
- b. sebelah timur : berbatasan dengan kecamatan Mangkutana
- c. sebelah selatan : berbatasan dengan kelurahan Bone-Bone
- d. sebelah barat : berbatasan dengan desa Patoloan dan desa Tamboke.

Gambar 1. Denah desa Bantimurung.



Desa Bantimurung dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dalam waktu 35 menit dari ibukota kabupaten, dengan luas wilayah desa Bantimurung 24,00 (km²).

Desa Bantimurung memiliki kondisi daerah datar dan pegunungan dengan ketinggian 150- 300 di atas permukaan air laut. Di desa Bantimurung mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian besar merupakan petani coklat, sawah, kelapa sawit, dan lain-lain. Dan adapun jumlah dusun yang terdapat di desa Bantimurung yakni ada 5 dusun yaitu dusun Salulemo, Karang, Ulusalu, Buntuporingan dan Salupangi.

2. Sarana dan prasarana umum

A. Transportasi darat

Akses menuju lokasi objek wisata berupa jalan pengerasan.

B. Tempat parkir

Sarana parkir di kawasan objek wisata belum optimal di karenakan hanya kendaraan roda dua yang bisa menempati areal parkir tersebut, dan mampu menampung sekitar 25-30 kendaraan roda dua

C. Listrik

Belum ada akses listrik di kawasan objek wisata bantimurung

D. Akses komunikasi

Belum ada akses komunikasi di lokasi objek wisata berupa jaringan telekomunikasi karna jarak dari tower pemancar signal sangatlah jauh

E. Fasilitas kesehatan

Belum ada fasilitas kesehatan di kawasan objek wisata bantimurung

F. Sistem keamanan dan penyelamatan

Belum ada sistem keamanan dan penyelamatan yang ada di kawasan objek wisata

indikator di atas kita bisa menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana belum memadai seperti tempat parkir, listrik, akses komunikasi, fasilitas kesehatan, serta keamanan dan penyelamatan.

Gambar 2. Dokumentasi air terjun Bantimurung



Menurut pantauan penulis terhadap objek wisata Bantimurung masih sangat alami dan asri, karena belum terlalu terjamah oleh manusia, naumun yang sangat memprihatinkan yakni akses menuju ke lokasi wisata tergolong kurang baik karena terdapat tanjakan yang tinggi dan turunan yang curam sehingga membahayakan para pengunjung untuk menuju ke lokasi objek wisata air terjun Bantimurung.

D. Hasil Dan Pembahasan

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam hal ini adalah pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Air Terjun Bantimurung yang berfokus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, yang menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban menyusun rencana strategis yang memuat landasan hukum, maksud dan tujuan Renstra, gambaran pelayanan SKPD, tugas dan fungsi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD, isu-isu strategis, visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan SKPD serta Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun kedepan yakni Tahun 2013 – 2018.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Pada dasarnya tujuan pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata Bantimurung ini iyalah untuk menarik para wisatawan datang berkunjung dan menikmati keindahan alam dari pada objek wisata air terjun Bantimurung, meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, serta juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitaran objek wisata air terjun Bantimurung.

Program adalah berupa urutan-urutan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun program-program yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1) Pembangunan infrastruktur pariwisata

Infrastruktur sebagai salah satu faktor penting pada pengembangan pariwisata, dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengunjung tentunya akan meningkatkan jumlah pengunjung yang berkunjung pada kawasan wisata tersebut. Penyediaan infrastruktur yang baik perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing kawasan wisata tersebut. Saat ini masih banyak pembenahan infrastruktur yang harus dilakukan untuk meningkatkan kawasan objek wisata Bantimurung.. Untuk itu pada pengembangan pariwisata perlu adanya perencanaan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk kawasan wisata.

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menunjang pendapatan asli daerah tersebut, dengan melalui pungutan retribusi masuk ke kawasan objek wisata. Menapa demikian karena dengan adanya pembangunan infrastruktur yang menunjang kebutuhan pengunjung, tentunya akan membuat nyaman dalam berkunjung dan hasil akhir yang didapatkan yaitu peningkatan jumlah pengunjung yang akan berdampak kembali pada pendapatan dari hasil pembangunan infrastruktur dari pada kawasan objek wisata itu sendiri.

Hal ini juga di tambahkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang menyatakan.

''Bantimurung ini memang sangat potensi untuk di kembangkan mudah mudahan di 2017 ini bisa dibangun salah satu fasilitas objek wisata ini yaitu ruang ganti, gasebo atau tempat istirahat para pengunjung wisata. Sedikit demi sedikit bisa buatkan.''(FPP. Wawancara pada tanggal 12/10/2017).

Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas juga menambahkan

“ perbaikan terhadap akses jalan yang menuju ke kawasan objek wisata bantimurung sehingga akan mempermudah para pengunjung menuju kawasan objek wisata Bantiimurung.”(M. Wawancara pada tanggal 12/10/2017).

Pernyataan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata dapat di jelaskan bahwa pengelolaan suatu objek wisata harus dimulai dari perbaikan infrastrukturnya, sehingga dapat atau mampu menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung menikmati keindahan dari pada objek wisata air terjun Bantimurung yaitu dengan cara perbaikan akses jalan menuju kawasan objek wisata Bantimurung akan mempermudah para pengunjung wisata dalam mengakses kawasan objek wisata Bantimurung.

Adanya perhatian khusus pemerintah terhadap pengelolaan objek wisata Bantimurung dari segi perbaikan infrastruktur , juga mampu meningkatkan usaha mikro masyarakat di sekitar kawasan objek wisata Bantimurung serta meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dari hasil penjualan karcis masuk ke kawasan objek wisata air terjun Bantimurung.

Kepala desa Bantimurung menambahkan.

“kalau di kawasan wisata Bantimurung ini nantinya yang di masukkan dalam penganggaran yaitu akses jalan menuju kawasan objek wisata serta pembuatan tangga menuju air terjun tingkat ke dua.”(M. Wawancara pada tanggal 13/10/2017).

Penyampaian kepala desa Bantimurung kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap objek wisata air terjun

Bantimurung dalam hal penganggaran guna untuk menunjang berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung objek wisata Bantimurung. pembangunan ke arah kemajuan tidak terlepas dari peran seorang kepala daerah yang dapat mengkoordinir kinerja bawahannya dalam melakukan suatu tugas yang di berikan oleh kepala daerah demi meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan menunjang pendapatan asli daerah agar nantinya anggaran pendapatan tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali destinasi objek wisata ataupun dapat dialih fungsikan untuk membangun infrastruktur yang lain.

2) Pemenuhan fasilitas standar

Pemenuhan fasilitas standar merupakan penyediaan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung wisata. Pemenuhan fasilitas standar seperti fasilitas keamanan, kesehatan, kebersihan, ataupun fasilitas komunikasi. Sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengunjung pariwisata maka pemerintah mempunyai tugas dalam hal pemenuhan fasilitas standar untuk para pengunjung objek wisata Bantimurung.

Fasilitas wisata merupakan sarana penunjang yang dapat menciptakan rasa menyenangkan yang disertai dengan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menikmati produk wisata yang ditawarkan. Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunika objek wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, kemandirian, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran, dan toko

cinderamata), transportasi (jalan alternatif, aspal, trotoar dan jalan setapak), kendaraan (angkutan umum, becak, ojek dan sepeda) dan lain-lain (mushola, tempat parkir, MCK dan *shetler*). Disamping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan dan memberikan berbagai kemudahan bagi wisatawan yang datang dalam rangka meningkatkan pengalaman rekreasi mereka.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa

“selain pembangunan infrastruktur wisata hal yang lain yaitu pemenuhan fasilitas standar demi menunjang kebutuhan pengunjung wisata, misalnya fasilitas keamanan, kebersihan dan fasilitas penunjang lainnya.(FPP. Wawancara pada tanggal 12/10/2017)”

Hal yang disampaikan oleh kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata kita bisa menyimpulkan bahwa terkait dengan upaya pengelolaan yang baik maka pemerintah mengambil langkah inisiatif yang dimana demi memenuhi kebutuhan para pengunjung wisata harus didukung dengan standarisasi fasilitas. Seperti yang dibutuhkan oleh kawasan objek wisata Bantimurung seperti fasilitas keamanan, kebersihan dengan penyediaan tempat sampah, maupun fasilitas lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung wisata air terjun Bantimurung. Dalam hal ini Dinas kebudayaan dan pariwisata mengambil langkah yang tepat dengan melakukan perencanaan terhadap fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh pengunjung wisata yaitu meliputi fasilitas standar seperti fasilitas keamanan, fasilitas kebersihan, kesehatan, dan fasilitas akses komunikasi yang belum ada di kawasan objek wisata Bantimurung

3) Pengembangan daya tarik wisata

Daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Daya Tarik Wisata Alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. Perencanaan dan pengelolaan Daya tarik wisata alam, sosial budaya maupun objek wisata minat khusus harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum tersusun, tim perencana pengembangan daya tarik wisata harus mampu mengasumsikan rencana kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan.

Selain itu pada umumnya daya tarik wisata suatu objek wisata berdasarkan adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya, adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

Kepala desa Bantimurung menjelaskan bahwa

“objek wisata Bantimurung memiliki keunikan tersendiri ang dimana keunikan itu berupa air terjun yang bertingkat yang jarang

dimiliki oleh daerah lain.(M. Wawancara pada tanggal 13/10/2017)''

Pendapat kepala desa Bantimurung dijelaskan bahwa kawasan objek wisata Bantimurung memiliki daya tarik tersendiri yang membuat para pengunjung ingin mengunjungi wisata ini karena terdapat air terjun yang bertingkat dan tentunya alam yang dimiliki oleh objek wisata ini masih sangat asri dari gangguan pihak yang dapat merugikan.

Pengelolaan suatu objek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada ceritera keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu diantaranya adalah:

Hal yang lain di sampaikan oleh masyarakat desa bantimurung.

''Akses ke lokasi kawasan objek wisata Bantimurung masih terbilang kurang, karena apabila tiba muusim penghujan maka akan sulit untuk mengakses kawasan objek wisata Bantimurung.''
(B. Wawancara pada tanggal 15/10/2017).

Hal yang di sampaikan oleh masyarakat desa Bantimurng yaitu kita bisa menarik kesimpulan bahwa perencanaan kawasan objek wisata Bantimurung juga harus memperhatikan masalah akses jalan menuju ke kawasan objek wisata, seperti halnya pada saat hujan turun maka akan sangat sulit untuk mengakses objek wisata dikarenakan kontur jalan yang tidak memadai untuk di akses. Sehingga di sini dibutuhkan peranan pemerintah dalam mencari solusi terbaik untuk permasalahan akses jalan menuju ke lokasi objek wisata Bantimurung.

Peran pemerintah yaitu melakukan perencanaan melalui kebijakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah kemudian akan di laksanakan sesuai dengan program-program kerja yang telah di bentuk demi menunjang pengelolaan kawasan objek wisata yang baik.

2. Pembangunan

Pembangunan infrastuktur dan fisik penting bagi pengembangan wilayah pariwisata. Semua bangunan fisik harus secara hati-hati didesain dan dioperasikan. Selain itu, infrastuktur juga perlu mencerminkan nilai-nilai konservasi sesuai dengan kebijakan tingkat ekosistem. Infrastruktur tidak terbatas mendukung nilai-nilai konservasi, *best practice* dan *lanskap*, tetapi juga membantu tampilan arsitektur, pemahaman budaya, kehidupan masyarakat, atau pengalaman lokal. pembangunan fasilitas untuk menunjang kemajuan sektor pariwisata yang ada di desa Bantimurung. Sehingga apa yang di harapkan oleh pemerintah dalam memajukan destinasi objek wisata yang ada di kabupaten Luwu Utara dapat tercapai dengan baik.

Pembangunan di fokuskan pada sarana dan parasarana publik yaitu akses ke lokasi objek wisata air terjun Bantimurung

Hal ini di kemukaan oleh kepala desa Bantimurung.

“Akses menuju destinasi pariwisata sudah mengalami perbaikan salah satunya yaitu melakukan pengerasan jalan serta membuka jalur untuk kendaraan roda dua yang bersifat sementara yakni dengan mengerahkan satu unit alat berat untuk pembukaan jalur yang lebih aman untuk menuju destinasi objek wisata air terjun Bantimurung.” (M. wawancara pada tanggal 13/10/2017).

Pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan fisik demi menunjang keselamatan para pengunjung wisata juga harus sangat di perhatikan demi terciptanya keamanan dalam berwisata, sehingga dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi objek wisata Bantimurung.

Adapun pendapat yang di sampaikan oleh masyarakat desa Bantimurung.

“Kami selaku masyarakat desa Bantimurung mendukung pemerintah untuk membangun kawasan wisata Bantimurung karna karena kawasan tersebut sangat layak untuk dibangun , dan sekarang sudah mendapat perhatian pemerintah ” (H. Wawancara pada tanggal 15/10/2017)

Pendapat masyarakat desa Bantimurung sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah demi memajukan sektor pariwisata yang ada di desa Bantimurung. Karena dengan membangun kawasan objek wisata air terjun Bantimurung masyarakat desa akan terkena dampak dari pembangunan kawasan objek wisata tersebut yaitu masyarakat sekitar dapat berjualan sofenir sebagai khas oleh-oleh dari desa Bantimurung atau menjajahkan minuman dan makanan untuk para pengunjung yang ada di kawasan objek wisata Bantimurung.

Kepala desa Bantimurung juga menambahkan.

“Pola Pemikiran remaja yang ada di desa Bantimurung juga akan di rubah sehingga akan menciptakan rasa aman terhadap pengunjung wisata air terjun Bantimurung.”(M. Wawancara pada 13/10/1017).

Pernyataan kepala desa Bantimurung Pembangunan tidak serta merta berarti bahwa hanya pembangunan infrastuktur saja akan tetapi pembangunan pola pikir masyarakat juga harus bisa di bentuk demi tercapainya tujuan bersama yang di

inginkan. Terciptanya rasa aman pastinya akan menarik lebih banyak lagi pengunjung wisata air terjun Bantimurung. Sehingga akan semakin memajukan sektor pariwisata yang ada di kabupaten Luwu Utara

Hal yang di tambahkan oleh pengunjung wisata.

“Tingkat kemanan disini cukup bagus karna tidak ada anak muda yang meresahkan para pengunjung wisata.”(P. wawancara pada tanggal 22/10/2017).

Hal yang lain ditambahkan oleh pengunjung wisata.

“Kalau untuk masalah keamanannya belum karna sudah ada yang pernah kehilangan helm dilokasi parkir. trus sudah ada juga tmpat parkir untuk kendaraan jadi tidak jauh miki lagi jalan kaki.”(E. Wawancara pada tanggal 22/10/2017).

Hal yang di kemukakan oleh pengunjung pariwisata bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah menaruh perhatian penuh terhadap pengelolaan destinasi pariwisata dengan pembangunan cara berfikir masyarakat yang baik.

3. Pengembangan

Pengembangan berarti suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu hasil produk tertentu, serta menguji keefektifan dari produk tersebut. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan secara ekonomi. Dengan mengembangkan fasilitas yang mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan.

Kepala desa Bantimurung menambahkan.

“Objek wisata di Bantimurung itu sekarang dan dulu itu berbeda kenapa semakin terkenal sekarang karena aksesnya sudah bagus bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena ini sudah ada perhatian dari pemerintah membangun jalan fasilitas kesana. Dan lebih terkenalnya lagi di tahun 2016 dan tahun 2017 karena adanya bendungan PDAM yang diperbaharui. Sehingga membuat penataan kawasan disana itu semakin cantik.”(M. Wawancara pada tanggal 15/10/2017).

Pernyataan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat desa Bantimurung yaitu terkait masalah akses jalan menuju ke kawasan objek wisata Bantimurung yang akan membuat kawasan wisata ini akan semakin terkenal di kalangan masyarakat. Dengan adanya bendungan PDAM di kawasan wisata ini karena akan mempermudah masyarakat menuju ke kawasan wisata air terjun Batimurung serta menambah ke eksotisan dari pada objek wisata air terjun Bantimurung.

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata menambahkan

Di tahun ini pak desa sudah mengadiri acara sosialisasi di Yogyakarta tentang pengembangan pariwisata, dan nantinya kalau sudah dikelola oleh BUMDES yang penganggarnya melalui dana desa akan semakin memajukan kawasan objek wisata ini.”(FPP. Wawancara pada tanggal 12/10/2017).

Pernyataan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata nantinya akan semakin bagus. Karena kawasan objek wisata ini karena pengelolaannya melalui badan usaha milik desa. Dan pada saat menjelang hari raya atau libur panjang kawasan objek wisata ini akan semakin ramai dan hal itu yang akan membuat atau menarik warga sekitaran objek wisata untuk mengambil suatu inisiatif dengan berjualan di sekitaran objek wisata air terjun Bantimurung.

Tambahan yang dikemukakan oleh pedagang sekitaran objek wisata selaku masyarakat setempat.

“Dengan adanya kawasan objek wisata ini kami merasa sangat terbantu untuk mencari penghasilan sampingan, serta penarikan retribusi untuk berjualan di kawasan ini belum ada.”(I. Wawancara pada tanggal 22/10/2017).

Hal yang di sampaikan oleh pedagang bisa kita menyimpulkan demi memenuhi kebutuhan para pengunjung wisata yang berkunjung di kawasan objek wisata. Dengan di bangunnya warung- warung yang ada di kawasan objek wisata juga akan membantu perekonomian warga dengan meningkatkan pendapatan para warga yang berjualan di sekitaran kawasan objek wisata.

Pengunjung wisata juga menambahkan.

“Keindahan alam sangat asri dan belum terjamah oleh tangan manusia, hanya saja perlu di tambahkan ruang ganti dan tempat peristirahatan demi kenyamanan.”(S. Wawancara pada tanggal 22/10/2017).

Hal yang di sampaikan oleh pengunjung pariwisata kita bisa menarik kesimpulan bahwa keamanan dan kenyamanan adalah skala prioritas pertama dalam pengembangan sebuah kawasan pariwisata, apa yang di harapkan dari pengembangan kawasan pariwisata ini bisa menjang pendapatan asli daerah dari aspek pengembangan pariwisata pariwisata.

Adpun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengembangan wisata yaitu:

- a) Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus

memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “*entertainment*” bagi wisatawan. meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata.

- b) Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat itu.
- c) Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal.
- d) Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.
- e) Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.

Mengembangkan obyek wisata dengan melakukan promosi yang gencar. Selanjutnya yang disebut dengan promosi adalah pengenalan yang dilakukan terkait obyek wisata air terjun Bantimurung yang berupa penyebaran informasi melalui segala media informasi dan komunikasi sehingga segala hal yang ada di kawasan obyek wisata air terjun Bantimurung dapat terekspose dan menarik wisatawan. Selain itu promosi pariwisata yang merupakan ujung tombak dalam mengenalkan, menginformasikan, dan mencitrakan suatu obyek wisata juga telah dilakukan namun sebelum melakukan promosi lebih jauh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata melakukan pembenahan-pembenahan terlebih dahulu sehingga promosi akan lebih efektif karena pembenahan telah dilakukan. Bagaimanapun indah dan menariknya suatu obyek wisata di suatu tempat, namun tanpa adanya promosi yang gencar dari pemerintah maupun pengelola obyek wisata tersebut, maka obyek wisata tersebut tak akan dijamah oleh wisatawan.

Selanjutnya di tambahkan pula oleh pengunjung objek wisata Bantimurung

“Harus ada promosi supaya masyarakat yang ada di luar dari kabupaten Luwu Utara juga dapat mengetahui keberadaan kawasan objek wisata Bantimurung.” (U. Wawancara pada tanggal 15/10/2017).

Hal yang disampaikan oleh pengunjung objek wisata Bantimurung kita bisa kembali menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor untuk mengembangkan kawasan objek wisata yaitu dengan melakukan promosi yang gencar sehingga kawasan objek wisata ini dapat terekspose hingga keluar daerah kabupaten Luwu Utara. Hal inilah yang menjadi tantangan baik pemerintah maupun masyarakat demi mewujudkan kawasan objek wisata sesuai dengan apa yang diharapkan.

E. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata

Berbicara masalah proses tentu tidak akan lepas dari yang namanya kendala, sama dengan yang terjadi pada suatu proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pengembangan. Semua ketiga indikator tersebut tidak akan lepas dari yang namanya kendala baik faktor pendukungnya maupun faktor penghambatnya. sehingga apa yang telah di rencanakan dapat terealisasi dengan baik serta dapat bermanfaat terhadap masyarakat luas.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait pengelolaan kawasan objek wisata air terjun Bantimurung yaitu:

1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi sarana dan prasarana merupakan hal pokok dalam pengelolaan dan merupakan alat penunjang keberhasilan dari suatu proses. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana tidak tersedia.

Hasil wawancara bersama kepala desa Bantimurung

“Yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan kawasan objek wisata ini yaitu terkendala masalah anggaran yang terbatas dikarenakan banyaknya tempat wisata yang masih membutuhkan anggaran juga . makanya pemerintah daerah itu memilah mana yang penting untuk di kembangkan”. (M. Wawancara pada tanggal 15/10/2017).

Hal yang disampaikan oleh kepala desa Bantimurung maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masalah anggaran yang dimana anggaran tersebut sangat terbatas sehingga menyebabkan pembangunan tempat wisata belum bisa dilakukan secara maksimal dan perlu tahapan-tahapan. Sehingga pembangunan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan merata.

Hal yang sama ditambahkan pula oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata

“ Insyallah di tahun depan objek wisata Bantimurung akan menjadi prioritas utama pembangunan kawasan objek wisata dan akan dimasukkan didalam penganggaran di tahun 2018 yang akan datang.”(FPP. Wawancara pada tanggal 12/10/2017).

Hal yang disampaikan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kita bisa menyimpulkan bahwa kawasan objek wisata Bantimurung akan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan kepariwisataan dalam menunjang Pendapatan asli daerah. Karena pemerintah dapat menilai mana kawasan yang sangat potensial untuk di kembangkan sehingga akan ada tibal baliknya ke daerah. dari pernyataan kepala dinas sangat benar apabila objek wisata Bantimurung masuk dalam kategori utama dalam penganggaran di tahun 2018.

Hal lain ditambahkan oleh pengunjung objek wisata.

“masih kurangnya fasilitas penunjang seperti ruang ganti pakaian, karena apabila habis sudah berenang pusing miki dimana mau ganti pakaian. Jadi terpaksa dipakai basah saja pakaian kalau mau ki pulang.”(S. Wawancara pada tanggal 22/10/2017).

Hal yang disampaikan oleh pengujung objek wisata bisa disimpulkan bahwa yang menjadi kendala yaitu belum dibangunnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai demi kepentingan pengunjung wisata.

Hal yang lain ditambahkan oleh pengunjung wisata

” masalah keamanan juga sangat harus diperhatikan, terus akses kelokasi objek wisata ini juga harus diperhatiakn karena sangat ini sangat penting sekali. Sehingga kita para pengunjung tidak kesulitan untuk menuju kawasan objek wisata ini.”.(P. Wawancara pada tanggal 22/10/2017).

Hal yang disampaikan oleh salah seorang pengunjung wisata bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini pemerintah mempunyai tantangan yang dimana mampu menjawab apa yang dikehendaki oleh masyarakat yang berkunjung ke kawasan objek wisata. Pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata harus mengambil langkah cepat dan tepat dalam proses pembangunan kawasan objek wisata . sehingga masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan dengan tidak adanya fasilitas penunjang yang ada, apabila fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung sudah tersedia maka akan membawa pengaruh positif baik dari segi memajukan kepariwisataan yang ada di kabupaten Luwu Utara maupun dalam hal peningkatan pendapatan daerah itu sendiri.

2. kesadaran masyarakat

Pola pikir atau *mindset* adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berfikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya menentukan level keberhasilan hidupnya. Bahwa kepercayaan menentukan cara berfikir , berkomunikasi dan bertindak seseorang. Dengan demikian jika ingin mengubah pola pikir yang harus di rubah adalah kepercayaan. Pandangan yang diadopsi untuk dirinya sangat mempengaruhi cara orang tersebut mengerakkan kehidupan. Artinya kepercayaan atau keyakinan seseorang memiliki kekuatan yang dapat mengubah fikiran, kesadaran, perasaan, sikap, dan lain-lain, yang pada akhirnya membentuk kehidupannya saat ini.

Pola pikir adalah cara berfikir atau keyakinan seseorang yang teraktualisasi dalam tindakannya, maka pola pikir hanya bisa diketahui setelah melihat sikap perilaku seseorang secara nyata. Karena setiap orang pada dasarnya

memahami sikap apa yang dia ambil, tindakan apa yang dia lakukan, maka logikanya setiap orang bisa mengetahui pola pikirnya sendiri.

Hasil wawancara dengan kepala desa Bantimurung.

“tingkat kesadaran masyarakat didesa ini masih terbilang cukup dalam hal pelestarian lingkungan yang ada disekitaran kawasan objek wisata Bantimurung, karena bagaimanapun tidak apabila keindahan alam yang ada di kawasan objek wisata Bantimurung rusak maka akan mengurangi minat para pengunjung untuk datang berlibur ke kawasan objek wisata ini.”(M wawancara pada tanggal 15/10/2017)

Dari apa yang disampaikan oleh kepala desa Bantimurung bisa disimpulkan bahwa pola pikir atau cara berfikir masyarakat desa Bantimurung masih terbilang cukup dalam hal kesadaran akan kelestarian lingkungan yang khususnya berada di sekitaran kawasan objek wisata Bantimurung, karena walaupun sarana dan prasarana sudah baik akan tetapi keindahan alam disekitaran kawasan objek wisata Bantimurung rusak maka akan mengurangi nilai keindahan dari pada kawasan objek wisata itu sendiri. Antara sarana dan prasarana serta pola pikir masyarakat harus berjalan seimbang demi terciptanya kawasan yang kondusif serta nyaman untuk dikunjungi. Namun sebaliknya apabila ada salah satu dari ketiga indikator tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan menciptakan ketidak selarasan antara sarana dan prasarana serta pola pikir yang tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Selanjutnya hal yang lain ditambahkan oleh masyarakat desa Bantimurung.

“kami selaku masyarakat desa akan berusaha juga membantu dalam hal pelestarian lingkungan yang ada dikawassan objek wisata Bantimurung, bagaimanapun tidak kawasan objek wisata itu juga sangat penting bagi kami karena bisa menjadi salah satu

mata pencarian sampingan.”(B. Wawancara pada tanggal 15/10/2017).

Dari apa yang diampaikan oleh masyarakat desa Bantimurung bisa kita simpulkan bahwa ada juga sebagian masyarakat desa yang sadar akan kelestarian lingkungan yang ada di sekitaran kawasan objek wisata Bantiurung, dengan demikian sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya akan kesadaran kelestarian lingkungan yang ada di sekitaran kawasan objek wisata Bantimurung. Akan tetapi tanpa bantuan dari pemerintah akan sangat sulit dicapai. Dengan ikut sertanya pemerintah akan membantu merubah pola pikir masyarakat dari tidak sadar akan kelestarian lingkungan menjadi sadar akan lingkungan.

Hai ini senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata.

“demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan misalnya pengerusakan lingkungan oleh masyarakat maka akan di laksanakan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat yang nantinya diharapkan akan dapat berubah sedikit demi sedikit walaupun hasilnya tidak langsung tapi akan kami laksanakan demi kelancaran pengelolaan kawasan objek wisata ini”(FPP wawancara pada tanggal 12/10/2017).

Dari apa yang disampaikan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata maka dapat disimpulkan bahwa demi terciptanya pengelolaan yang optimal maka harus di lakukan pengelolaan dengan optimal pula seperti yang diutarakan oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata yang rencananya akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi sadar lingkungan terhadap masyarakat desa Bantimurung. Hal ini bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat desa supaya sadar akan lingkungan dan keindahan alam yang ada di sekitaran kawasan objek wisata.

Hal yang lain diutarakan oleh kepala desa Bantimurung.

“Terkait masalah pungutan liar yang ada di kawasan objek wisata Bantimurung pemerintah telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal- hal tersebut. Karena memang diatas pengawasan masih sangat minim sehingga ada beberapa masyarakat yang mengambil kesempatan” (M. Wawancara pada tanggal 15/10/2017)

Dari apa yang disampaikan oleh kepala desa Bantimurung disimpulkan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah yaitu dari sektor pengawasan yang sangat minim. Untuk mengurangi dan mengantisipasi dampak negatif, pemerintah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan diwilayahnya. Dengan hal ini akan mampu meminimalisir dampak negatif yang di timbulkan dari pola pikir masyarakat yang masih sangat minim akan kesadaran lingkungan dan sosialnya.

3. keamanan pengunjung

Mengingat objek wisata alam adalah jasa yang dikelola oleh manusia agar dapat dinikmati orang lain. Oleh karena itu, objek wisata harus dipersiapkan agar dapat memuaskan wisatawan. Layanan penting yang apabila diabaikan juga akan menjadi kendala adalah keamanan pengunjung, untuk itu perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan baik dari kemungkinan terjadinya kecelakaan, keributan maupun pencurian.

Hal ini disampaikan oleh kepala unit pengelola teknis daerah

Untuk itu maka kami selaku pemerintah yang berwenang dalam mengelola kawasan objek wisata kami akan menyediakan petugas keamanan demi menunjang keamanan pengunjung objek wisata air terjun Bantimurung. (M .wawancara pada tanggal 12/10/2017).

Hal yang disampaikan oleh kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata senada dengan apa yang diutarakan oleh kepala desa Bantimurung

Dalam menunjang penyelenggaraan pariwisata yang baik maka harus perlu disediakan fasilitas keamanan.(M. Wawancara pada tanggal 15/10/2017)

Hal yang disampaikan oleh kepala desa Bantimurung kita bisa menyimpulkan bahwa adanya kendala yang dihadapi dalam hal keamanan pengunjung wisata merupakan satu kendala yang penting , kenapa demikian karena tanpa adanya rasa aman yang diterima oleh pengunjung wisata akan menurunkan keinginan orang untuk datang berkunjung ke objek wisata Bantimurung, dan hal ini akan berimbas pada pendapatan yang di terima oleh daerah , karena berkurangnya minat orang yang ingin berkunjung ke kawasan objek wisata Bantimurung.

Untuk mengatasi kendala diatas maka penyelenggara wisata alam oleh pemerintah perlu mendapat dukungan dari masyarakat dan para pihak lainnya. Pelibatan ini tentunya harus berpedoman pada undang-undang dan regulasi yang ada, serta dengan tetap memperhatikan kepentingan publik. Agar pelibatan masyarakat dan para pihak dalam pemanfaatan wisata alam berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran para pihak untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan hutan, beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek hukum aspek sosial dan aspek lingkungan

Aspek hukum, pemanfaatan pariwisata alam harus dilakukan dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya menumbuhkan kesadaran beberapa pihak terhadap peraturan perundang-undangan juga harus

diperhatikan , misalnya dengan pemilihan jenis wisata alam yang lebih berorientasi kepada pendidikan bagi pengunjungnya, sehingga dapat memberikan edukasi dan tercipta ketaatan terhadap aturan.

Aspek sosial, pemanfaatan pariwisata alam harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pengusaha pariwisata harus dilakukan dengan menaati norma-norma sosial, budaya, dan tradisi masyarakat setempat. Pengembangannya harus didasarkan pada kesepakatan dengan masyarakat setempat melalui musyawarah. Membardayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat.

Aspek lingkungan, pemanfaatan pariwisata alam juga harus dilakukan dengan kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam. Dilakukan di blok pemanfaatan, luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam. Kemudian sarana wisata alam yang dibangun harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan dimensi-dimensi pengelolaan yakni perencanaan, pembangunan dan pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sudah terkelola dengan sebagaimana mestinya mulai dari tahap perencanaan sampe ke tahapan pembangunan sudah terrealisasi dengan baik.
2. Kendala-kendala yang dialami terkait pengelolaan kawasan objek wisata Bantimurung seperti sarana dan parasarana, kesadaran masyarakat, dan keamanan pengunjung sudah bisa teratasi sedikit demi sedikit dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek hukum , aspek sosial, dan aspek lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pengelolaan obyek wisata air terjun Bantimurung, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar sekiranya pengelolaan yang dilakukan terkait dengan obyek wisata air terjun Bantimurung dapat terealisasi secepatnya sehingga baik pemerintah, wisatawan dan terlebih lagi masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang besar dari pengembangan yang dilakukan tersebut.

Begitu pula dengan berbagai kawasan obyek wisata yang ada di Kabupaten

Luwu Utara agar lebih dikembangkan lagi sehingga visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni Mewujudkan Kabupaten Luwu Utara Sebagai Destinasi Wisata Unggulan di Sulawesi Selatan dapat terwujud dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Intrans Publishing. Malang.
- Admodiwiryo. 2005. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Ardadizya Jaya. Jakarta.
- Richard L. 2002. *Manajemen* Edisi Kelima Jilid Satu, Erlangga. Jakarta.
- Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Edisi II Cetakan Keempat Belas. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akutansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Jogjakarta.
- Marpaung, 2002. *Pengetahuan Kepariwisataaan Edisi Revisi*. Alfa Beta. Bandung.
- Munir. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen)*, Ghalia. Jakarta.
- Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Nugroho, 2001 *Sistim Informasi Akuntansi*, Erlangga. Jakarta
- Nugroho. 2011. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Paturusi, 2008. *Perencanaan Kawasann Pariwisata*, press UNUD. Denpasar.
- Richardson, 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Edisi Revisi 2001. Penterjemah Paul Sitohang. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rustiadi Ernan, 2006. *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Edisi Mei 2006. Fakultas Pertanian, IPB. Bogor
- Rustiadi. 2006. *Agropolitan Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang*. Cetakan Pertama. Crestpent Press. Bogor.
- Sasmojo, S. 2004. *Masyarakat Dan Pembangunan*. Studi Pembangunan ITB. Bandung.
- Siagian, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.

Siswanto, 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*, Bumi Aksara. Jakarta.

Sobri, 2009. *Belajar dan Pembelajaran , Prospect*. Bandung.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfa Beta. Bandung

Sunarto, 2013. *Perkembangan Peserta Didik. Dirjen Dikti Dependikbud*. Jakarta.

Yoeti, 2008. *Ekonomi Pariwisata, Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Kompas. Jakarta.

Website

<http://www.scribd.com/doc/111637278/1-Pemahaman-Tata-Kelola>. Diakses tanggal 30 april 2017 20:16

http://gmup.ugm.ac.id/id/product/pariwisata/tata_kelola_destinasi_membangun_ekosistem_pariwisata. Diakses tanggal 30 april 2017. 20:19

http://luwuutarakab.bps.go.id/websiteV2/pdf_publicasi/Kabupaten-luwuutaraDalam-Angka-Tahun-2015. (di akses pada tanggal 14/10/17 pukul 09.38)

http://luwuutarakab.bps.go.id/websiteV2/pdf_publicasi/Daerah-KecamatanBone-Bone-Tahun-2015.pdf (di akses pada tanggal 14/10/17 pukul 09.53)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/holisme> (di akses pada tanggal 15/10/17 pukul 19.21

Undang-undang

Intruksi presiden no 16 tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataanid.wikisource.org/.../UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009*

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/Pmk.02/2006 Tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan bupati luwu utara Nomor 73 tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

L

A

M

P

I

R

A

N



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. (0411) 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 0416/FSP/A.3-I/TV/1438/2017

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Zulkifly Mahdi
Stambuk : 105640174113
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Tata Kelola Potensi Wisata Air Terjun Bantimurung di Kabupaten Luwu Utara"

Pembimbing I : Dr. H. Mappamiring, M.Si
Pembimbing II : Muh. Ahsan Samad, S.IP., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 18 April 2017



Dr. H. Muhammad Idris, M.Si
NBM. 782 663

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Keteu Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 1332/FSP/A.1-VIII/IX/1439 H//2017 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Zulkifly Mahdi
Stambuk : 105640174113
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Kawasan Wisata Bantimurung di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
Judul Skripsi : *“Pengelolaan Objek Wisata Bantimurung di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 September 2017
Dekan,
Ub. Pembantu Dekan I





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 – Fax (0473) 21955

M A S A M B A

REKOMENDASI

Nomor : 430/147 /DISBUDPAR/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAGFIRANI NASSA, S.STP.,M.Si
NIP : 19790711 199711 2 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Alamat : Perumahan Pajalesang Blok D7 Kota Palopo

Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : ZULKIFLY MAHDI
NIM : 105640174113
Pekerjaan : Mahasiswa Pada Universitas Muhammadiyah Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Dusun Tanimba Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan.

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan penelitian / pengambilan data dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara dengan judul skripsi "pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Bantimurung Di Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Luwu Utara , 20 November 2017



MAGFIRANI NASSA, S.STP.,M.Si
19790711 199711 2 001

Bersama dengan Kepala Dinas dan Kepala UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara



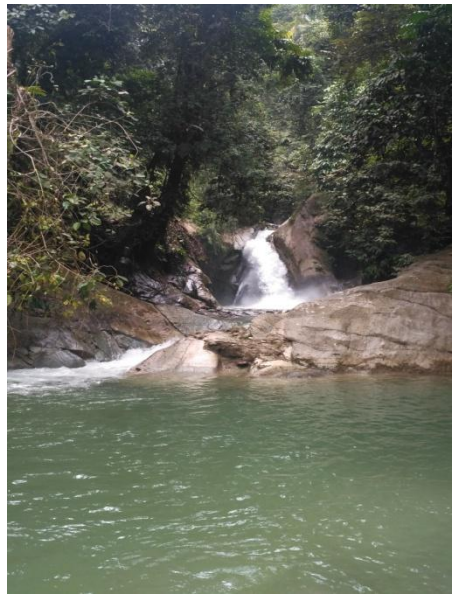
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Berasma dengan Kepala Desa Bantimurung



Air terjun Bantimurung Kabupaten Luwu Utara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Zulkifly Mahdi, disapa Pippi, Lahir di Bone-Bone 19 Desember 1995. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Pengalaman organisasi yang pernah digelutinya dimulai dari organisasi Palang Merah Remaja SMAN 1 Bone-Bone periode (2012-2013), Organisasi Siswa Intra Sekolah, Organisasi Daerah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat kepada banyak orang.